

**KONTRADIKSI ANTAR REGULASI TENTANG USIA PERKAWINAN
ANAK PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN
HAK PENDIDIKANNYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk

Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar *Sarjana Hukum Islam* (S.HI)

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Ahmad Andrian

NIM 11210017



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

KONTRADIKSI ANTAR REGULASI TENTANG USIA PERKAWINAN ANAK PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKANNYA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Juni 2014

Penulis,

Ahmad Andrian

11210017

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Andrian NIM : 11210017
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KONTRADIKSI ANTAR REGULASI TENTANG USIA PERKAWINAN
ANAK PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN
HAK PENDIDIKANNYA**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 18 Juni 2015

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr.Sudirman, MA.

Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag

NIP 1977082220005011003

NIP 19600910 198903 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Andrian, NIM 11210017, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONTRADIKSI ANTAR REGULASI TENTANG USIA PERKAWINAN ANAK PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKANNYA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

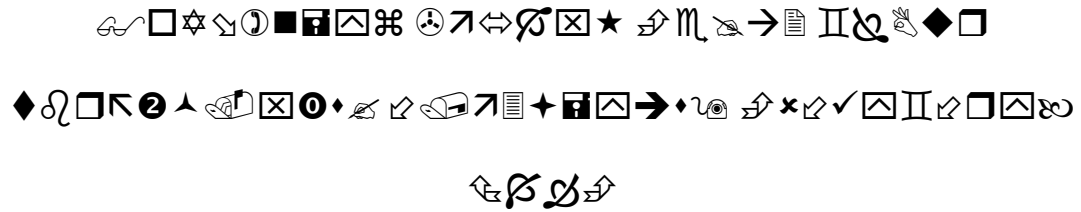
Dengan penguji:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 19751108 200901 2 003 | (.....)
Ketua Penguji |
| 2. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag.
NIP. 19600910 198903 2 001 | (.....)
Sekretaris |
| 3. Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP. 19681218 199903 1 002 | (.....)
Penguji Utama |

Malang, 09 Juli 2015
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO



**“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
mengingat kebesaran Allah SWT.”**

(Q.S. al-Dzariyat: 49)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tiada pujian yang lain selain rasa syukur kepada-Nya atas limpahan rahmat dan karunianya dan tiada kata lain selain beribu trimaksasih saya atas pelbagai didikan, pengalaman, pujian dan cacian serta kasih sayang yang diberikan kepada saya dari pelbagai pihak, dari sanalah saya bisa belajar tentang kerasnya kehidupan dan menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh seperti sekarang ini, terimakasih ini akan saya persembahkan :

1. Almarhum Eyang Putra Mbah Kasio yang telah mengajarkan tentang pendidikan moral dan filosofi kesederhanaan dalam kehidupan dan Eyang Putri Mbah Ngateni yang menjadi sebuah penyemangat saya untuk menjadi anak yang mandiri, tangguh dan senantiasa menjaga nama baik keluarga besar.
2. Ayah saya Bapak Ngateno dan Ibuda saya tercinta Ibu Supini, tanpa semua jirih payah, tetesan keringat dalam mendidik dan membesarkan saya mungkin ananda tidak akan bisa menjadi seperti saat ini.
3. Semua bapak ibu guru saya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan pendidikan baik agama maupun formal tiada apresiasi yang pantas kepada panjenengan semuanya kecuali doa semoga panjenengan semuanya mendapatkan balasan kemuliaan dunia dan surga-Nya kelak di hari akhir ...Amin.

4. Terima kasih teramat mendalam bagi semua yang pernah singgah di hati mungkin untaian doa lah yang hanya bisa saya berikan semoga kesuksesan menyertai perjalanan hidup kita semuanya. Semoga yang menyayangi saya hari ini dan menjadi penyemangat saya hari ini mampu untuk senantiasa mendampingi sampai kepelaminan nanti...Amin. Dan biarlah semua menjadi rahasia saya kamu dan Tuhan.
5. Sahabat-sahabat PMII Rayon “Radikal Al-Faruq” Garuda Sakti 16
6. Pengurus Keluarga Besar Mahasiswa Bidik Misi UIN Maliki Malang masa bakti 2012-2013.
7. Kabinet Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah masa bakti 2014.
8. Dulur-dulur PSHT Komisariat UIN Maliki Malang, beserta dulur-dulur PSHT Cabang Malang.

KATA PENGANTAR



Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**KONTRADIKSI ANTAR REGULASI TENTANG USIA PERKAWINAN ANAK PEREMPUAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKANNYA**” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada perombak dekadensi moral Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita semua menuju zaman yang gemilang yakni agama Islam. Semoga kita tergolong sebagai orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kela. Amien...

Penulis merasa tanpa adanya bantuan, arahan, bimbingan dan diskusi dengan pelbagai pihak, serta bantuan secara moral dan sepiritual dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara serta untaian doa bahwa hanya Allah yang sanggup membalas semua kebbaikannya. Karenanya ucapan tersebut sangat perlu penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Hj. Mufidah, CH. M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada ayahanda Ngateno dan Ibunda Supini, yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dan doanya untuk putramu ini, supaya ananda selalu semangat dan sukses meraih cita-cita.
9. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon "Radikal" Al-Faruq. Tetap tangan terkepal dan maju kemuka.
10. Sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sunan Ampel.
11. Dulur-dulur Persaudaraan Setia Hati Terate Komisariat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Dulur-dulur Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Malang.
13. Teman-temaku Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Teman-teman jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah dan Hukum Bisnis Syariah tahun 2011.

Adalah suatu kenyataan yang tak bisa terpungkiri bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak tahuan dari penulis dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif selalu penulis harapkan untuk perbaikan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya hanya kepada Allah juahlah penulis memohon dan berharap, semoga skripsi yang sederhana ini ada guna dan manfaatnya, baik untuk pribadi penulis maupun bagi mereka yang mencintai ilmu pengetahuan khususnya penelitian hukum Islam.

Malang, 18 Juni 2015

Penulis,

Ahmad Andrian

11210017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
---------	--------

aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “*t*” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

4. Billâh ‘azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Metodologi Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Definisi Perkawinan	20
A.1. Perkawinan Adat	26
A.2. Perkawinan Menurut Hukum Islam	29
A.3. Perkawinan Menurut B.W.	31
A.4. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	35
B. Regulasi yang Mengatur tentang Perkawinan di Indonesia	37
C. Batas Kedewasaan Anak Perempuan Berdasarkan Regulasi	42
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Kontradiksi antar Regulasi tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan di Indonesia	44
B. Implikasi Kontradiksi antar Undang-Undang Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Perempuan	60
B.1. Keunggulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	68
B.2. Kekurangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	71
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

ABSTRAK

Andrian, Ahmad, 11210017, 2015. ***Kontradiksi Antar Regulasi Tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikannya***. Skripsi Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj Mufidah, CH, M.Ag.

Kata Kunci: Kontradiksi, Regulasi, Hak Pendidikan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan aturan tertinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam perkawinan di Indonesia, tetapi dalam poin tertentu bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 131 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketiga regulasi tersebut sepakat bahwa hak pendidikan adalah hak dasar yang harus dilindungi tanpa terkecuali, sedangkan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Konstitusi karena menjadi landasan dan dasar hukum pembenaran perkawinan anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk membedah mengenai batas kedewasaan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah diberlakukan sejak 41 tahun yang lalu. Idealnya karena telah berlaku selama 41 tahun yang lalu, sebagian besar isi perundangan telah sangat dipahami oleh masyarakat. Tetapi dalam beberapa hal Undang-Undang tersebut perlu segera direvisi karena dianggap *out of date* dan dalam beberapa hal dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan Penentuan Bahan Hukum, dan Pengkajian Bahan Hukum.

Perkawinan sebagaimana terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 merupakan sebuah hal yang sangat sakral dan tidak boleh dilakukan sembarangan oleh karenanya di butuhkan tidak hanya kematangan secara fisik tetapi juga kematangan secara psikis. Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dan *maslahah*. Tetapi dalam aspek lain tentunya tidak boleh mengabaikan hak-hak warga negaranya, seperti halnya hak pendidikan yang telah dijamin dalam Konstitusi yakni Pasal 31 ayat (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi dengan demikian tanpa terkecuali harus ada penyeteraan, kecuali apabila Undang-Undang mengatur lain. Oleh karenanya sebagaimana juga terdapat dalam pembukaan UUD 1945 jaminan pendidikan untuk perempuan mutlak harus dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah, sebagai bentuk jaminan atas hak dasar, karena tujuan pendidikan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.

ABSTRACT

Andrian, A. 2015. *The Contradiction between the Regulation of the Age of Marriage of Girl and Its Implication for the Fulfillment of Her Right of Education*. Thesis. Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dr. Hj. Mufidah CH, M. Ag.

Key words: Contradiction, Regulation, Right of Education.

The Act No. 1 of 1974 About Marriage is the highest rules used as the guidelines in marriage in Indonesia, but in certain points, it is contend with the article 31 subsection (1) of the Constitution; article 26 of the Act No. 35 of 2014 on the protection of the child; and article 129, subsection (2) of the Act No. 37 of 2009 about health. These three regulations agree that right of education is a fundamental right which must be protected without exception. However, the age limit of marriage in article 7 subsection (1) of the Act about marriage is contrary to the Constitution for it has been the cornerstone and the legal basis to the justification of child marriage whom has not yet reached the age of 16 (sixteen).

The research objective focus on investigating the limits of maturity specified in the Act No. 1 of 1974 about marriage which has been enforced since 41 years ago. Ideally, since it has been in force for 41 years, most of the content of the regulation has been well-understood by the public. But in some ways the laws need to be revised immediately because it is considered out of date and in some ways is judged inappropriate with current conditions.

This research is considered as a normative legal research using the statute approach. The data used is the primary, secondary, and tertiary legal materials. The method of collecting the legal materials is conducted by collecting the determination of legal materials and the study of legal materials.

The result of this research shows that marriage as contained in the Act No. 1 of 1974 is a very sacred thing and should not be done haphazardly because the person in concerned needs not only physically maturity but also psychological maturity. In other words, the purpose of marriage is to realize harmonious family (*mawaddah wa Rahmah* and *maslahah*). On the other side, this purpose should not ignore the rights of citizens, especially the right of education guaranteed in the Constitution, exactly Article 31, subsection (1) which states that every citizen has the right to get a proper education. Thus, there must be equality among those regulations. Besides, as stated in the preamble of the Constitution, the guaranty of education for females must be fulfilled and protected by the government, as a form of guaranty of basic rights, for the purpose of educational is to raise the pride and the dignity of human being.

خلاصة البحث

اندریان أحمد، 11210017، 2015. أن التناقض بين تنظيم سن الزواج للفتيات والآثار المترتبة على الوفاء بحقوق بدرجة التعليم. البحث العلمي. شعبة الأحوال الشخصية كلية الشريعة. الجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بالانق. المشرفة، الحاجة مفيدة، الماجستير

الكلمات الرئيسية: التناقض، التنظيم، حقوق التربية

القانون رقم 1 لعام 1974 "حول الزواج" هو أعلى القواعد المستخدمة كمبادئ توجيهية في الزواج في إندونيسيا، ولكن في نقاط معينة تتعارض مع المادة 31 الفقرة (1) من الدستور، والمادة 26 من القانون رقم 35 سنة 2014 بشأن الحماية الطفل، والمادة 129 الفقرة 2 (من القانون رقم 37 لعام 2009 حول الصحة. وافقت بموجبه في اللائحة الثالثة من هذا القبيل أن التعليم هو حق أساسي يجب حمايته دون استثناء، بينما سن الزواج المحدد في الفقرة (1) من المادة 7 من القانون يتعارض مع الدستور الزواج لكن الزاوية للأساس القانوني وتبرير زواج الأطفال، لم نصل بعد إلى سن الثامنة عشرة (16) سنة من العمر.

أهداف البحث لتشريع حول حدود تاريخ الاستحقاق المحدد في القانون رقم 1 لعام 1974 حول الزواج الذي يطبق منذ 41 عام. ومن الناحية المثالية لأنها كانت في القوة منذ 41 عام، معظم محتوى التشريع قد جيد جداً فهم الجمهور. ولكن في بعض الطرق هو الحكم ضرورة القوانين تنقح فوراً لأنها تعتبر قديمة (زوال) وفي بعض الطرق لم تعد تتوافق مع الظروف الحالية.

ويشمل هذا البحث هذا نوع البحوث القانونية المعيارية باستخدام نهج قانوني (نهج النظام الأساسي). أما البيانات المواد المستخدمة فهي المواد القانونية الأولية، والثانوية والتعليم العالي. أما الطريقة جمع المواد القانونية فبتحديد "المواد القانونية"، ودراسة القانون المادي.

كان الزواج كما ورد في القانون رقم 1 لعام 1974 سند ولد من الداخلية بين رجل وامرأة كالزواج والزوجة بتكوين أسرة (الأسرة) سعداء وتبقى عليها بألوهية الله تعالى. في اللغات الأخرى، وهو غرض الزواج مودة سكانية ورحمة. ولكن في جوانب أخرى بالتأكيد لا ينبغي أن تتجاهل حقوق مواطنيها، مثل حقوق التعليم التي قد تم المكفولة في الدستور هي الفقرة 31 من المادة (1) كل مواطن لها الحق في الحصول على تعليم. وهكذا دون استثناء يجب أن تكون معادلة عند تشريع ينظم أخرى. وبالتالي، كما ورد في مقدمة القنون الأساسية 1945 لتحصيل الرفاهية العامة وتبصير الحياة الوطنية الأمة، وبذلك يعتبر ضروريا لإصلاح قانون الزواج في إندونيسيا.